

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita 1994). Sedangkan menurut Alexander (1994) pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Berdasarkan pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Kartasasmita dan Alexander (1994), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke IV tahun 2020-2024 merupakan salah satu rancangan perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu mencakup empat pilar yang merupakan amanat Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Perencanaan pembangunan di Indonesia juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk mendukung berjalannya RPJMN Bappenas. Berdasarkan hasil *monitoring* terhadap 223 proyek dan tiga program yang terdaftar dalam daftar Proyek Strategis Nasional KPPPIP saat ini (mengacu pada Perpres 56 Tahun 2018), perbandingan status proyek pada Juni 2019 dan Desember 2018 mengalami perubahan yang cukup signifikan pada proyek tahap penyiapan, tahap transaksi dan tahap konstruksi.



Perbandingan status proyek pada Juni 2018 dan Desember 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Status Kemajuan Proyek Strategis Nasional
 Sumber: Laporan KPPIP Semester 1 2019 (diolah)

Kegiatan pembangunan infrastruktur di tahap penyiapan, tahap transaksi dan tahap konstruksi pada RPJMN KPPIP 2015-2019 disusun dengan menempatkan penekanan besar pada percepatan infrastruktur. Dalam periode tahun 2015 hingga 2019 pemerintah bertujuan untuk membangun 1.800 km jalan tol, 2.159 km kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, 35.000 MW pembangkit listrik, dan banyak pembangunan infrastruktur lainnya. Proyek pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 belum sepenuhnya terselesaikan sehingga harus terus dilanjutkan pembangunannya. Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, *Internet of Things* (IoT) maupun *artificial intelligence* (AI). Pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah.

Secara makro, industri penjaminan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. PT Jamkrindo (Persero) hadir sebagai lembaga penjaminan yang membantu pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



dari bank maupun nonbank, serta membantu para mitra (penerima jaminan) dengan cara melunasi sementara kerugian dari nasabah (terjamin) yang gagal bayar (Pranoto 2017). Kegiatan pembangunan infrastruktur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2024 merupakan peluang besar bagi PT Jamkrindo (Persero) sebagai lembaga penjamin proyek pembangunan infrastruktur Indonesia. Produk PT Jamkrindo (Persero) yang berkaitan dengan penjaminan proyek pembangunan antara lain produk *Suretyship*, Kontra Bank Garansi dan Penjaminan Kredit Konstruksi.

Usaha PT Jamkrindo (Persero) dalam memasarkan produk penjaminan salah satunya melalui *marketing point*. *Marketing point* merupakan unit kerja terkecil yang terdiri dari agen resmi penjaminan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) untuk memasarkan produk PT Jamkrindo (Persero) dalam ekspansi *marketing* yang lebih dalam, atau singkatnya, sebagai pihak yang membantu kantor cabang dimana pengoperasiannya dilakukan oleh agen.

Market share PT Jamkrindo (Persero) saat ini jika dibandingkan dengan Pasar Kredit UMKM (Data BI per April 2019) masih sangat jauh persentasenya. Berikut ini gambaran kecil *market share* Jamkrindo terhadap pasar kredit UMKM di wilayah kerjanya, jika dilihat gambaran pada struktur organisasi terkecil dari Jamkrindo (KUP).

Tabel 1- *Market share* PT Jamkrindo (Persero)

KUP	Jumlah Kab Kota dalam Wilayah	<i>Market share</i>
Surabaya Kota	4	3,35%
Bekasi	2	11,13%
Cibinong	2	13,27%
Bojonegoro	5	13,44%
Jember	3	8,18%
Magelang	5	11,23%
Rantau Prapat	6	11,05%
Cilacap	2	8,80%
Pamekasan	4	8,45%
Dumai	3	8,20%
Mandailing	5	7,81%
Watampone	5	23,17%
Bogor	1	29,22%
Cimahi	2	36,24%
Lubuk Linggau	4	21,96%
Pangkalan Bun	4	4,96%

Sumber: Divisi Jaringan dan Layanan (2020)

Jumlah *marketing point* yang dimiliki oleh PT Jamkrindo (Persero) hingga Maret 2020 yaitu sebanyak 24 *marketing point* yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah *marketing point* tersebut belum mencakup daerah-daerah yang aksesnya tidak terjangkau dari Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan PT Jamkrindo (Persero) namun daerah tersebut dalam proses pembangunan infrastruktur, maka

perlu dilakukan ekstensifikasi (perluasan) area *marketing point* PT Jamkrindo (Persero). Oleh karena itu, Kajian Pengembangan Bisnis yang direncanakan yaitu memberikan masukan kepada perusahaan berupa tercapainya kelayakan pengembangan *marketing point*.

1.2 Tujuan

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan dan eksternal perusahaan dengan melakukan ekstensifikasi (perluasan) *marketing point* di daerah pembangunan Indonesia pada PT Jamkrindo (Persero).
2. Menganalisis kelayakan pengembangan bisnis penetrasi pasar melalui ekstensifikasi (perluasan) *marketing point* di daerah pembangunan Indonesia pada PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan aspek finansial dan nonfinansial.

2 METODE ANALISIS KAJIAN PENGEMBANGAN BISNIS



2.1

Lokasi dan Waktu

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Kajian Pengembangan Bisnis merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT Jamkrindo (Persero) dengan alamat perusahaan di Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat selama dua minggu terhitung dari tanggal 4 Maret 2020 sampai tanggal 20 Maret 2020. Hari kerja mengikuti ketentuan perusahaan yaitu dari hari Senin – Jum'at mulai pukul 07.30 WIB - 16.30 WIB dalam kurun waktu satu minggu.

2.2 Data, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Kajian Pengembangan Bisnis menggunakan dua jenis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan pembimbing lapangan dan karyawan serta pengamatan langsung selama PKL dilaksanakan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur sebagai pendukung data primer yang sudah didapatkan.